

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

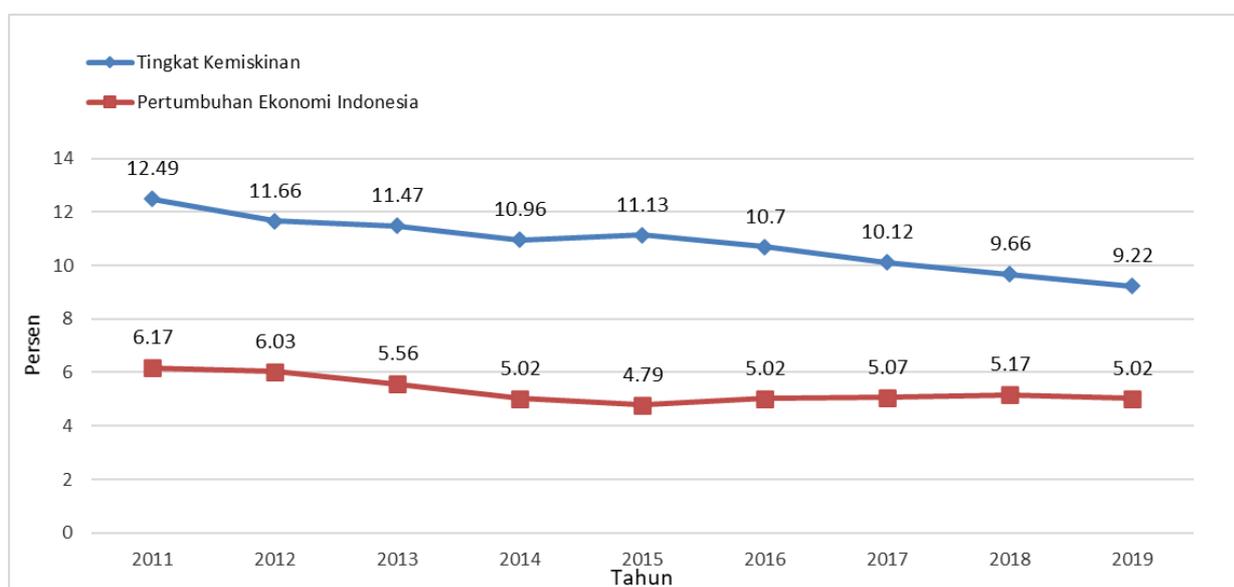
Kemiskinan menjadi masalah makro ekonomi di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Sejak *Millenium Development Goals* (MDGs) dimulai dari tahun 2000 hingga dilanjutkan dengan program tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015, kemiskinan terus menjadi salah satu tujuan utama. Para ahli sepakat bahwa tujuan paling utama dalam pembangunan ekonomi di suatu negara dapat dikatakan berhasil ketika dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut, akan tetapi juga harus menyelesaikan masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan serta penyediaan lapangan pekerjaan (Augustin, 2017)

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2010) kemiskinan merupakan keadaan yang membuat seorang individu atau dalam sebuah wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Standar minimal kebutuhan dasar tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan kepada masyarakat. Pada tahap selanjutnya, klasifikasi penduduk miskin dan tidak miskin dilakukan dengan cara membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan. Kemiskinan tidak dapat dianggap hanya sebagai sebuah parameter bahwa seorang individu memiliki pendapatan yang kecil (*low income*), tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan kapabilitas atau (*capability handicap*) (Jalan, 2000). Dengan demikian kemiskinan tidak bisa dilihat dari sisi besarnya pendapatan seseorang akan tetapi harus juga dilihat dari berbagai aspek sehingga kemiskinan dapat bersifat multidimensi.

Dampak buruk dari kemiskinan sangatlah banyak, selain menimbulkan problematika sosial, kemiskinan juga berdampak kepada pembangunan ekonomi suatu negara (Raj Arunachalam, 2017). Kemiskinan yang tinggi akan membuat beban suatu negara dalam menciptakan keberhasilan pembangunan akan semakin besar, sehingga karena adanya masalah kemiskinan secara tidak langsung pembangunan

ekonomi suatu negara juga akan menjadi terhambat. Sepanjang sejarah masalah kemiskinan terus menjadi masalah utama yang tidak kunjung terselesaikan. Oleh sebab itu masalah kemiskinan harus diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan harus sistematis dalam seluruh unsur kehidupan masyarakat (Choili, 2014).

Tingkat kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan penting yang harus segera diselesaikan pemerintah Indonesia. Berbagai macam kebijakan pengentasan masalah kemiskinan di Indonesia terus diperbarui dengan tujuan agar tingkat kemiskinan Indonesia semakin menurun. Program-program pengentasan kemiskinan tersebut memang memberikan hasil yang positif dimana untuk pertama kalinya pasca orde baru pada tahun 2018 tingkat kemiskinan Indonesia berada dibawah 2 digit tepatnya sebesar 9.66 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik (2019), data diolah

**Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2019**

Prestasi tersebut belum bisa dikatakan sebagai hasil yang maksimal karena angka dibawah 2 digit tersebut masih belum mencapai target pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Sebagai gambaran, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah tahun 2015-2019 pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 7-8 persen secara nasional, akan tetapi penghitungan Badan Pusat Statistik

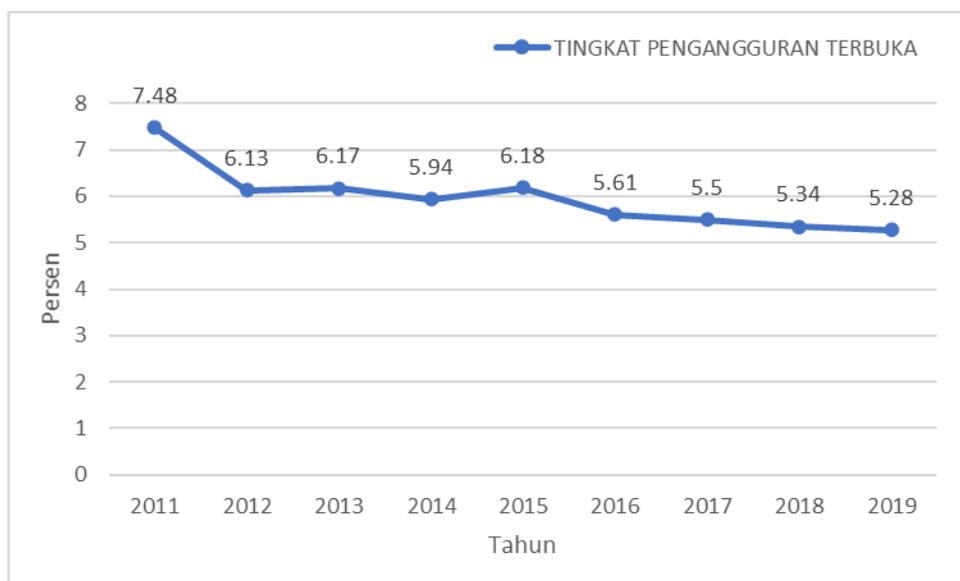
(BPS) Indonesia, pada akhir tahun 2019 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,2 persen. Belum tercapainya target pemerintah ini berimplikasi bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang selama ini dibuat dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mampu mensejahterakan dan membebaskan masyarakat miskin keluar dari jurang kemiskinan.

Pembagian pendapatan nasional berdasarkan pendekatan aktivitas produksi di Indonesia terdiri dari 17 sektor. Penyerapan tenaga kerja dari 17 sektor tersebut sampai akhir tahun 2019 sejumlah 63,5 juta tenaga kerja, dan mayoritas dari tenaga kerja di 17 sektor masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu sejumlah 12,1 juta tenaga kerja. Potensi penyerapan tenaga kerja masih bisa dikembangkan dalam membantu upaya pengurangan kemiskinan dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan. Secara garis besar pertumbuhan ekonomi berdampak pada dua informasi yaitu, Pertama, pembuat kebijakan tetap membutuhkan informasi yang lebih rinci untuk membuat keputusan tentang alokasi sumber daya publik dan sumber dana untuk membiayai pengeluaran publik. Kedua, secara teoritis memang benar secara keseluruhan pertumbuhan dapat mengurangi kemiskinan, namun tidak semua sektor mengurangi tingkat kemiskinan (Ravallion, 1996)

Suryahadi (2009) melakukan penelitian mengenai dampak pertumbuhan 3 sektor utama yaitu sektor pertanian, industri, dan jasa terhadap tingkat kemiskinan di pedesaan dan perkotaan pada 33 provinsi di Indonesia menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor jasa memiliki dampak paling besar di pedesaan dan perkotaan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan sektor pertanian hanya mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Maros Ivanic, 2018) menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan sektor pertanian akan memberikan efek pengurangan tingkat kemiskinan paling besar dibandingkan dengan sektor jasa dan industri di negara-negara miskin, akan tetapi efek tersebut akan semakin berkurang seiring dengan semakin kecilnya *share* sektor tersebut terhadap perekonomian di suatu negara.

Faktor lain yang berpengaruh dalam penyumbang tingkat kemiskinan adalah pengangguran (Ivanic & Martin, 2018). Masalah pengangguran sendiri sangat erat

kaitannya dengan persoalan kemakmuran suatu masyarakat, kesejahteraan maksimum masyarakat akan terwujud ketika dalam kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*Full Employment*). Pengangguran akan membuat tingkat pendapatan masyarakat menjadi berkurang hal ini akan menurunkan tingkat kesejahteraan dari masyarakat dan dapat menimbulkan masalah kemiskinan (Pierre-Richard Agenor, 2018).



Sumber : Badan Pusat Statistik (2019), data diolah

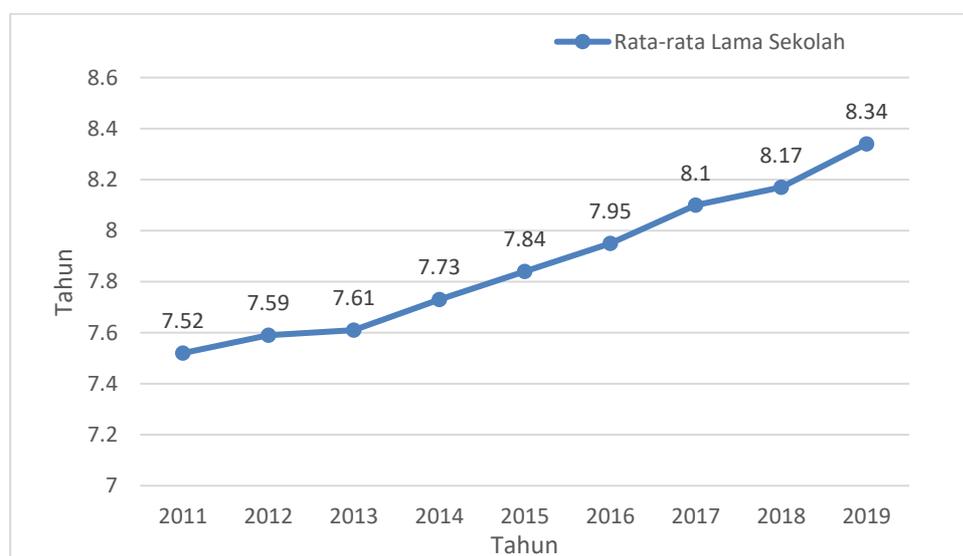
### Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia (dalam persen) Tahun 2011-2019

Dalam Gambar 1.2 terlihat bahwa sejak tahun 2011 hingga akhir tahun 2019 tingkat pengangguran di Indonesia terus mengalami tren penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi bukan berarti masalah pengangguran di Indonesia sudah berhasil diatasi. Faktanya sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2019 jumlah pengangguran di Indonesia tetap berada di kisaran 7 juta penduduk, dimana tingkat pengangguran menurun dari 6,18 persen menjadi 5,28 persen tidak bisa diartikan bahwa jumlah pengangguran juga ikut menurun.

Okoye (2014) menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan. Dijelaskan dalam studi empiris tersebut pengangguran terbuka di Nigeria muncul karena kebijakan dan tata kelola yang buruk dari pemerintah, kurangnya pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta

program pendanaan yang kurang memadai mengakibatkan para pemuda di Nigeria tidak memiliki akses besar untuk mendapatkan pekerjaan setelah mereka lulusan perguruan tinggi.. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratih (2016) , bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan dalam jangka pendek, karenalemahnya ukuran tingkat pengangguran berbeda dengan ukuran kemiskinan.

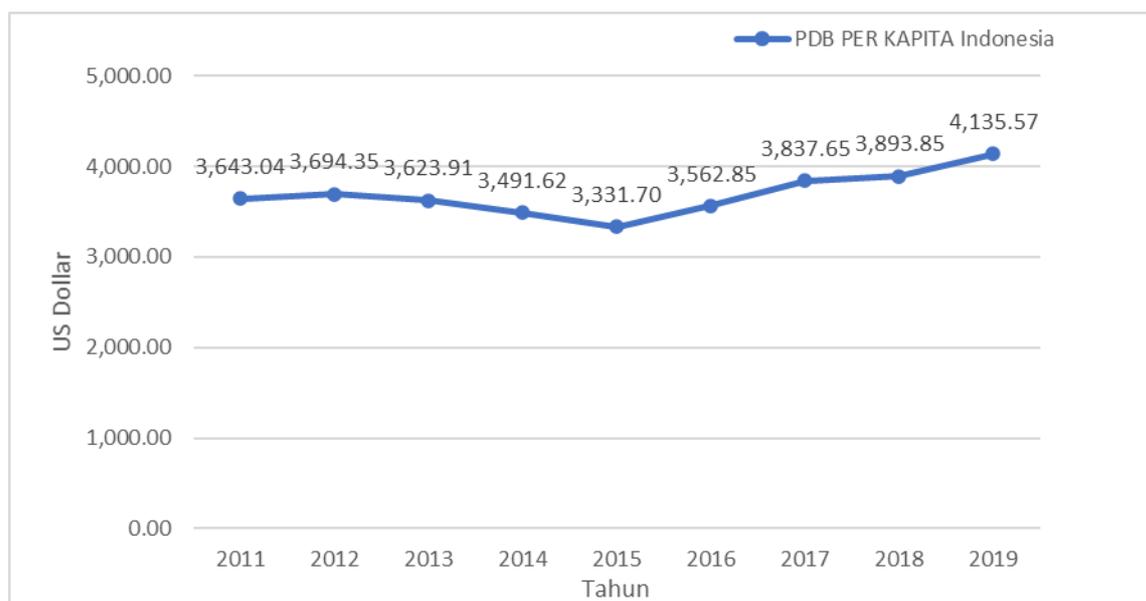
Pengentasan kemiskinan yang efektif adalah pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan pengembangan *human capital* terutama pendidikan dan Kesehatan (Sachs, 2006). Menurut Amartya Sen (2001) penyelesaian masalah kemiskinan harus melalui pengembangan sektor-sektor krusial dalam masyarakat seperti pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan membuat semua masyarakat memiliki ketrampilan dan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang juga lebih tinggi sehingga rantai kemiskinan akan bisa terputus.



Sumber : Badan Pusat Statistik (2019), data diolah

**Gambar 1.3 RLS di Indonesia (Tahun)****Tahun 2011-2019**

Dalam Gambar 1.3 terlihat bahwa tingkat pendidikan secara nasional berdasarkan RLS menunjukkan adanya kecenderungan meningkat dari 2011 hingga 2019 dimana angka tertinggi dari RLS di Indonesia adalah di angka 8.34 tahun pada tahun 2019. Berdasarkan data di atas kebijakan dari pemerintah yang mewajibkan belajar selama 12 tahun yang dimulai dari tahun 2015 belum dilakukan secara merata hingga saat ini. Ukuran kesejahteraan masyarakat suatu wilayah dapat dilihat dari seberapa besar tingkat PDRB per kapita wilayahnya. PDRB adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah, sedangkan PDRB per kapita adalah hasil total output suatu wilayah dibagi dengan total jumlah penduduk, dimana makin besar nilai PDRB per kapita suatu wilayah mengindikasikan semakin besar pendapatan masyarakat wilayah tersebut.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2019), data diolah

### **Gambar 1.4 PDB Per Kapita di Indonesia (Tahun) Tahun 2011-2019**

Berdasarkan Gambar 1.4 terlihat bahwa secara nasional angka tertinggi dari PDB per kapita di Indonesia adalah sebesar 4.135,57 US Dollar pada tahun 2019. Resosudarmo (2006) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pendapatan per kapita yang tinggi dengan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan pendapatan per kapita yang tinggi belum tentu dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat apabila ketimpangan negara tersebut tinggi, pendapatan per kapita tinggi, dan hasil pembangunan tidak akan bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Sesuai dengan latar belakang serta penelitian terdahulu maka peneliti akan tertarik untuk mengambil topik penelitian berjudul “ Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi sektoral, RLS, PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan.”

### **1.2 Kesenjangan Penelitian**

Kesenjangan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian, metode yang digunakan dan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan 17 sektor sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ivanic (2018) hanya menggunakan 3 sektor yaitu sektor pertanian, industri, dan jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Data Panel, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Suryahadi (2009) menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS). Data penelitian menggunakan rentan waktu dari tahun 2011 hingga tahun 2019, sedangkan pada penelitian Suryahadi menggunakan data tahun 1984 hingga 2002 Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka dan PDRB per kapita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Okoye (2014) menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan yang positif dengan tingkat kemiskinan. Tombolotutu (2018) dalam penelitian juga menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskina dan PDRB per kapita berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan..

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari pertumbuhan ekonomi dari 17 sektor perekonomian, tingkat pengangguran terbuka,

RLS, dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2019 baik analisis secara simultan ataupun secara parsial.

#### **1.4 Ringkasan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dilakukan dengan metode analisis regresi data panel karena untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi sektoral, RLS (RLS), PDRB per kapita, dan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) terhadap tingkat kemiskinan. Penggunaan metode ini untuk mengatasi masalah standar error heteroskedastisitas yang muncul karena data lintas Provinsi dapat diatasi. Variabel yang saya gunakan dalam penelitian adalah data kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap GDP Provinsi di Indonesia, tingkat gini ratio, dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia data tersebut saya ambil dari data SUSENAS dan SAKERNAS yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Hasil penelitian ini berkontribusi terhadap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan langkah dalam pengembangan sektor apakah yang paling perlu diperbaiki dan di tingkatkan.

#### **1.5 Ringkasan Hasil Penelitian**

Secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan 17 sektor ekonomi, RLS, PDRB per kapita, TPT secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hasil koefisien uji simultan sebesar 0,3162. Hal ini dapat diartikan bahwa model dapat menjelaskan keadaan secara nyata sebesar 31,62 persen. Secara parsial variabel yang signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan yaitu pertumbuhan sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Variabel yang signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan yaitu RLS, pertumbuhan sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, dan sektor jasa lainnya

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian yang berhubungan satu dengan lainnya.

Bab 1:

Berisi tentang penjelasan latar belakang topik permasalahan, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset, dan sistematika penulisan.

Bab 2:

Berisi tentang landasan teori penelitian, penelitian sebelumnya dan hipotesis.

Bab 3:

Berisi tentang pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data yang digunakan, model analisis, dan teknik analisis.

Bab 4:

Berisi tentang gambaran umum penelitian yang dilakukan, deskripsi hasil penelitian, analisis dan pembuktian hipotesis, serta pembahasan.

Bab 5:

Berisi tentang kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan, dan saran untuk penelitian yang akan datang